

## DAFTAR REFERENSI

- Diaz. (2012). *Perpajakan Indonesia Edisi 2 Revisi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Junisa Mandagi, H. a. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Banguna (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(2)*, 2018, 369-378.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Octavia, N. R. (2019). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lumajang. *Volume 2, July 2019, ISSN : 2622-3031*.
- Panggabean. (2019). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat. *Vol. 9 No.2 Februari 2019, ISSN: 2087-4669*.
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 18 tahun 2010 mengenai Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- Peraturan Pemerintah No 55 tahun 2016 pasal 3 sistem pemungutan pajak daerah . (t.thn.).
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains Bandung.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi 8, Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rizkina, M. (2019). Pengaruh Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderating. *Vol. 1 No.2 Juli 2019, ISSN:2685 -5674*.
- Sari. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan BPHTB Dan PBB-P2 Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor). *Vol 13 (2) 2018, ISSN : 2302-1810*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.

Ulil Absor, H. M. (2017). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Di Kabupaten Minahasa Utara. *Vol.5 No.2 Juni 2017, ISSN 2303-1174*.

Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 mengatur mengenai dengan penambahan jenis pajak baru, perluasan basis pajak, juga keluasaan penetapan tarif pajak.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 1.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ayat 157.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada pasal 88.

Windy. (2015). Analisis Dasar Pengenaan dan Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ternate. *Jurnal EMBA Vol. 3 No.4, 2015, ISSN: 2303-1174*.